

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Ni Kadek Rai Eldayanti¹
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati²
Ni Wayan Yuniasih³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

¹[e-mail : raielda22@gmail.com](mailto:raielda22@gmail.com)

ABSTRACT

Fraud prevention in managing village finances is important in implementing village governance. This study aims to determine the effect of village apparatus competence, internal control systems, integrity, and accountability on the prevention of fraud in the management of village finance in villages in the shrinking sub-districts. The population in this study were all village officials in villages in the sub-district of Shrink sub-district, respondents were used as many as 72 people consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Government, Head of Public Welfare, Head of Service, Head of Finance, Head of General and Planning. The method of determining the sample using a purposive sampling technique. From the results of this study the competence of village officials, internal control systems, and integrity did not significantly influence fraud prevention. While accountability has a negative and significant effect on preventing fraud (fraud) in the management of village finances in villages in the shrinking sub-district.

Keywords: *Competence of village officials, internal control systems, integrity, accountability, fraud prevention*

PENDAHULUAN.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan untuk menciptakan desa sebagai suatu pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat agar tercipta desa yang maju, mandiri dan demokratis, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera (www.bpkp.go.id). Undang-Undang Nomor 6 Tahun, 2014 Pasal 72 tentang Desa. Menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan, dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dalam

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UU tentang Desa akan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di setiap wilayah berbeda-beda itu dikarenakan pemberian alokasi dana desa tersebut harus didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa. Pembagian dan tata cara pemberian alokasi dana desa dilakukan melalui keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah yaitu berdasarkan pada peraturan pemerintah setempat.

Pedoman yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa adalah peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 mengingat didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Komisi pemberantasan korupsi (2015) melakukan sebuah kajian yang menunjukkan adanya permasalahan dalam hal sumber daya manusia dalam tata kelola keuangan desa. Permasalahannya mulai dari rendahnya kemampuan administrasi yang dimiliki aparat desa. Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih secara ilegal untuk memperoleh

keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Aini et al., 2017).

Fenomena kasus pengelolaan keuangan desa banyak terjadi di Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pada 2015 sampai 2017 kasus tindakan korupsi di desa meningkat, terdapat 127 kasus penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi. Penyalahgunaan anggaran desa rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa (*Indonesia Corruption Watch, 2018*).

Di tahun 2017 terdapat dugaan penyelewengan dana usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, tepatnya di desa Selat. Kasi Pidsus Kejari Bangli Ngurah Gede Bagus Jatikusuma mengatakan, kasus ini sejatinya telah mencuat sejak tahun 2013, namun mulai ditangani oleh Kejari Bangli sejak akhir tahun 2017. Kejari kemudian meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan sejak tahun 2018 dengan menetapkan dua tersangka. Kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar 150 juta. Kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana tersebut dengan modus menyalurkan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada dua puluh penerima fiktif, dimana dana tersebut yang bersumber dari pemerintah dan di alokasikan khusus untuk membantu masyarakat desa dalam mengembangkan perekonomian desa.

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor penyebab

kecurangan. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi dari aparatur desa tersebut, terdapat sistem pengendalian internal, memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) ?
3. Apakah integritas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*)?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Untuk mengetahui pengaruh integritas dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai penerapan teori keagenan yaitu bagaimana aparat desa bertanggungjawab pada prinsipal atas pengelolaan keuangan desa agar perilaku kecurangan (*fraud*) dapat dicegah. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki permasalahan yang ada untuk menciptakan keuangan desa yang transparan agar program dana desa dapat bermanfaat secara optimal kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur dasar desa.

KAJIAN PUSTAKA

Pihak yang dikontrak oleh pemegang saham (*principal*). Karena dipilih, maka pihak agen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah di laksanakan oleh *Principal*. Sikap merupakan bagian dari komponen kompetensi hal tersebut menjadi penting karena individu yang memiliki sikap akan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, maka cenderung tidak melakukan

kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, aparaturnya desa yang mengurus dana desa sudah seharusnya memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi dan mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik.

Penelitian ini didukung dengan *Fraud Triangle Theory* menjelaskan terdapat tiga faktor yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressy, 1953). Menurut GONE Theory terdapat empat faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilihat berdasarkan pandangan dari sisi perilaku manusia yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Keserakahan berkaitan dengan adanya sifat serakah yang berada di dalam diri individu, kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat, yang memberikan peluang untuk individu dalam melakukan kecurangan, kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dimiliki seseorang untuk menunjang hidupnya dan pengungkapan berkaitan dengan tindakan yang akan dihadapi oleh pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (Manossoh, 2016). *Fraud Triangle Theory* dikembangkan menjadi *Fraud Diamond* dengan menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni kemampuan (*capability*) sehingga menjadi empat elemen yang dikenal dengan *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait pengaruh kompetensi aparaturnya desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Komang (2017) menyatakan bahwa kompetensi

aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sulthony (2016) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Santoso (2008) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan Melisa (2019) memberikan hasil bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan kompetensi aparatur desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan kecurangan.

Penelitian Najahningrum (2013), Pramuditya (2013), Zulkarnain (2013), dan Fauzi (2011) menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya sistem pengendalian internal buruk, maka hal tersebut akan menjadi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui prilakunya (Schlenker,2008). Ramadhaniyati (2014) menyimpulkan bahwa integritas memiliki berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Integritas berpengaruh dalam mencegah kecurangan, resiko kecurangan dapat dicegah dengan adanya sikap integritas aparatur desa, karena integritas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab. Apabila aparatur desa memiliki sikap integritas tinggi maka

aparatus desa tersebut telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan etika. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di suatu desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Berdasarkan penelitian Ismail, dkk menyatakan bahwa di desa belum memiliki pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri 113/2014 kondisi sumber daya manusia yang tidak baik dalam pengelolaan keuangan desa akibat dari minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis. Meskipun demikian, para aparatus desa memiliki semangat untuk mensukseskan pelaksanaan program desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memaksimalkan program fisik untuk menyerap dana desa. Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, dalam hal ini anggaran dapat diartikan sama dengan keuangan desa yang pengelolaannya berbasis anggaran (Muljo et al, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

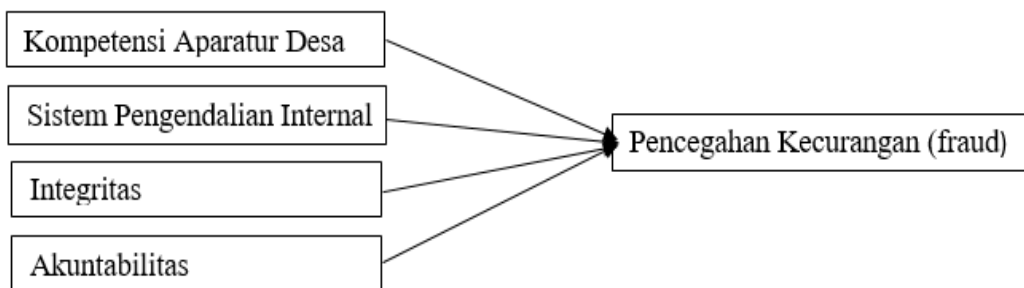
H₄: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka desain penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 3.1 Desain Penelitian



Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*), dan variabel bebas (*independent variable*).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y). Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) diukur dengan empat indikator, yaitu penetapan kebijakan *anti-fraud*, prosedur, teknik pengendalian dan kepekaan terhadap *fraud*.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa (X1), kompetensi disini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi atau keadaan di dalam pelaksanaan kerja. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Kompetensi aparatur desa diukur dengan tiga indikator yaitu, pengetahuan, kemampuan dan sikap.

Sistem pengendalian internal (X2), sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian terjadinya kecurangan (*fraud*), sistem pengendalian internal diukur dengan tiga indikator yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian.

Integritas (X3), integritas adalah sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Variabel integritas diukur dengan tiga indikator yaitu, kejujuran keberanian, sikap bijaksana dan tanggungjawab.

Akuntabilitas(X4), akuntabilitas adalah amanah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan, kepada pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan. Variabel akuntabilitas diukur dengan empat indikator yaitu, perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh desa di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang terdiri dari 9 desa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa dengan kriteria yakni merupakan perangkat desa aktif bekerja sebagai: kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan rakyat, kepala seksi pelayanan, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan perencanaan, serta memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

Berdasarkan kriteria di atas peneliti menentukan sampel perkantoran desa dan jumlah seluruh sampel yang ada di desa se-kecamatan susut Kabupaten Bangli.

Tabel 3.2. Sampel penelitian

No	Desa / Kelurahan	Populasi	Kepala desa	Sekretaris desa	Kasi pemerintahan	Kasi kesra	Kasi pelayanan	Kaur keuangan	Kaur umum	Kaur perencanaan	Jumlah
1	Selat	14	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	Pengiangan	14	1	1	1	1	1	1	1	1	8
3	Pengelumbaran	17	1	1	1	1	1	1	1	1	8
4	Demulih	18	1	1	1	1	1	1	1	1	8
5	Tiga	18	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6	Susut	17	1	1	1	1	1	1	1	1	8
7	Apuan	15	1	1	1	1	1	1	1	1	8

8	Abuan	15	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9	Sulahan	19	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Total	147									72

Sumber : Desa se-kecamatan Susut, Bangli

Dari tabel diatas dari 9 jumlah desa yang ada di kecamatan susut Kabupaten Bangli, dengan kriteria yang ditetapkan peneliti maka jumlah sampel yang diperoleh berjumlah 72 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data jumlah responden yang menjawab kuesioner yang diukur menggunakan skala likert 5 point. Data kualitatif penelitian ini adalah daftar nama-nama desa yang menerima dana desa di desa se-kecamatan susut Kabupaten Bangli, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden pada kuesioner.

1. Uji Instrumen penelitian yang terdiri dari :
 - a. Uji Validitas dimana suatu instrumen dikatakan valid jika nilai *pearson correlation* terhadap skor total diatas 0,30 (Sugiyono,2018)
 - b. Uji Reliabilitas dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > dari 0,70 (Ghozali,2011).
2. Analisis statistik deskriptif, teknik analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang meliputi minimum, maksimum, nilai *mean* (rata-rata) dan standar deviasi dari data penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, yang terdiri dari :
 - a. Uji Normalitas dimana jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.
 - b. Uji Multikolinearitas ,dilakukan dengan melakukan uji *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) dimana jika nilai Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
 - c. Uji Heterokedastisitas, dimana jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka model yang baik tidak terjadi heterokedastisitas
4. Uji Kelayakan Model, yang terdiri atas :
 - a. Uji F menunjukan apakah model yang digunakan layak atau tidak dalam penelitian ini dan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ maka model regresi layak digunakan dan semua variabel independen dalam model ini dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2011).
 - b. Koefisien Determinasi (R^2) mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen (Ghozali, 2011).

5. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali,2011). Apabila nilai Signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Apabila nilai p-value > 0,05 maka hipotesis tidak diterima, ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai p-value < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

6. Analisis Regresi Linaer Berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono,2015:303) :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil perhitungan dan model persamaan diatas:

Y = Pencegahan Kecurangan (*fraud*)
 α = konstanta

X1= Kompetensi Aparatur Desa
X2= Sistem Pengendalian Internal
X3= Integritas
X4= Akuntabilitas
e = Residual (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa yang bekerja di kantor desa se-kecamatan susut Kabupaten Bangli. Pengiriman 72 Kuesioner pada aparat desa dilakukan tanggal 11 Februari 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020, kuesioner yang kembali sebanyak 69 kuesioner dan yang tidak kembali sebanyak 3 kuesioner. Untuk mengantisipasi perbedaan karakteristik jawaban yang diberikan oleh responden yang membalas kuesioner dengan responden yang tidak membalas kuesioner maka dilakukan uji *non respon bias*.

Data responden yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 69 responden yang meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengetahui proporsi responden laki-laki dan perempuan pada desa se-Kecamatan Susut Kabupaten Bangli jumlah responden laki-laki sebesar 57% dan perempuan sebesar 43%, jadi responden yang paling banyak adalah laki-laki.
2. Karakteristik responden berdasarkan usia digunakan untuk mengetahui rentang usia aparat desa pada desa se-Kecamatan Susut Kabupaten Bangli,

responden yang berusia 17 sampai 25 tahun sebesar 1%, yang berusia 26 sampai 30 sebesar 12%, lalu yang berusia 31 sampai 40 sebesar 30% dan yang berusia diatas 40 tahun sebesar 57%.

3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan aparat desa se-Kecamatan Susut, jumlah responden yang berpendidikan SMA sebesar 80%, Diploma sebesar 7%, dan yang berpendidikan Sarjana sebesar 13%.

Pengujian *non-respon bias* dilakukan untuk mengukur apakah terdapat perbedaan karakteristik jawaban yang diberikan oleh responden yang membalas dan yang tidak membalas kuesioner. Mengingat adanya keterbatasan informasi yang diperoleh terhadap identitas responden yang tidak mengirim jawaban maka responden yang mengembalikan jawaban melewati waktu yang telah ditentukan dianggap mewakili jawaban responden yang tidak merespon.

Pengujian *non-respon bias* dilakukan dengan mengelompokkan jawaban yang diterima ke dalam dua kelompok, yaitu: 1) kelompok awal, untuk kuesioner yang diterima kembali peneliti sejak awal hingga satu minggu setelah kuesioner diberikan, dan 2) kelompok akhir, untuk kuesioner yang diterima lebih dari satu minggu setelah kuesioner diberikan. Responden yang dimasukkan kedalam kelompok awal sebanyak 63 dan yang dimasukkan kedalam kelompok akhir sebanyak 6 responden.

Hasil proses data untuk uji *non-respon bias* dapat dilihat bahwa nilai *t-test* variabel X1 adalah 0,363, Nilai *t-test* variabel X2 adalah 0,102, Nilai *t-test* variabel

X3 adalah 0,702, Nilai *t-test* variabel X4 adalah 0,662, Nilai *t-test* variabel Y adalah 0,517. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai *t-test* menunjukkan bahwa $p > 0,05$ yang artinya tidak terdapat perbedaan jawaban yang diberikan oleh kedua kelompok sehingga dapat dikatakan sampel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat representasi populasi. (Sumber: Lampiran 7).

Analisis statistik deskriptif sebagai analisis untuk melihat distribusi data yang digunakan sebagai sampel. Analisis statistik deskriptif menggunakan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	69	36.00	54.00	46.9275	2.86623
Pengendalian	69	16.00	30.00	25.4783	2.72574
Integritas	69	46.00	64.00	54.8551	4.00469
Akuntabilitas	69	24.00	40.00	34.6232	3.23629
Pencegahan	69	19.00	33.00	27.6957	2.57422
Valid N (listwise)	69				

Sumber : Data primer diolah, 2020

Tabel diatas menjelaskan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas, Akuntabilitas dan Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa. Dari tabel tersebut dapat diketahui secara berurutan variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) mempunyai nilai *minimum, maximum, mean* dan *standar deviation* sebesar 36.00, 54.00, 46.9275, 2.86623. Secara berurutan variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) mempunyai nilai *minimum, maximum, mean* dan *standar*

deviation sebesar 16.00, 30.00, 25.4783, 2.72574. Secara berurutan variabel Integritas (X3) mempunyai nilai *minimum, maximum, mean* dan *standar deviation* sebesar 46.00, 64.00, 54.8551, 4.00469. Secara berurutan variabel Akuntabilitas (X4) mempunyai nilai *minimum, maximum, mean* dan *standar deviation* sebesar 24.00, 40.00, 34.6232, 3.23629. Dan secara berurutan variabel Pencegahan Kecurangan (*fraud*) mempunyai nilai *minimum, maximum, mean* dan *standar deviation* sebesar 19.00, 33.00, 27.6957, 2.57422. (Sumber : Lampiran 5).

Uji reliabilitas dilakukan kepada 69 orang responden dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal atau reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1994 dalam Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel adalah lebih dari 0,06. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel. (Sumber : Lampiran 6).

Uji validitas dilakukan kepada 69 orang responden dengan cara mengkorelasikan antar skor item instrumen dengan skor total seluruh item pertanyaan. Batas minimum dianggap memenuhi syarat validitas apabila $r = 0,3$. Jadi untuk memenuhi syarat validitas, maka butir pertanyaan atau Pernyataan dalam penelitian harus memiliki koefisien korelasi $> 0,3$. Apabila korelasi antara butir skor dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir pertanyaan atau Pernyataan dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Jogiyanto, 2007). Hasil perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pertanyaan dalam

kuesioner menunjukan bahwa perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pertanyaan besarnya $>0,3$. Hal ini berarti semua butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. (Sumber : Lampiran 6).

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang biasa disebut dengan K-S. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila $\text{sig.} > 0,05$ (Ghozali, 2006). Pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,399 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal. (Sumber : Lampiran 8).

Uji Multikolinearitas melihat nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan uji multikolinearitas, nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 10% ($X_1=0.525$; $X_2=0.350$; $X_3=0.468$; $X_4=0.754$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($X_1=1.903$; $X_2=2.854$; $X_3=2.137$; $X_4=1.326$) yang berarti sudah tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. (Sumber : Lampiran 8).

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolut residual* dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik terlihat

bahwa seluruh variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 atau sebesar $X_1=0.892$; $X_2=0.712$; $X_3=0.733$; $X_4=0.755$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. (Sumber: Lampiran 8)

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda, model penelitian dapat dituliskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = 14.572 + 0,212X_1 + 0,017X_2 + 0,204X_3 - 0,245X_4 + e$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 14,572.

Dari hasil regresi dapat diketahui angka *Adjusted R-Square* menunjukkan koefisien determinasi atau peranan *variance* (variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka *Adjusted R-Square* sebesar 0.149 menunjukkan bahwa 14,9% variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 85,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.(Sumber : Lampiran 9).

Uji Anova atau *F-test* menghasilkan F_{hitung} sebesar 3.972 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Nilai *F-test* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu sebesar 3.972 dengan signifikansi 0,006. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

(Sumber : Lampiran 9).

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.

1. Hipotesis pertama menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,212 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,13 yang berarti Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
2. Hipotesis kedua menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.017 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,923, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 yang berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien parameter 0.204 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,057, sehingga dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 dapat disimpulkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020 sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
1. Berdasarkan hasil hipotesis pertama menyatakan Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,212 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,13 yang berarti Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparat pemerintahan desa merupakan faktor penghambat pengelolaan keuangan desa yang baik, dan perekrutan aparatur desa biasanya dilakukan masih melalui sistem kekeluargaan tanpa adanya sistem rekrut profesional. Berdasarkan hasil demografi hampir 80% aparatur desa berpendidikan SMA hal ini juga dapat mengakibatkan aparatur kurang terampil dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, harus didukung dengan latar belakang pendidikan seperti mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu seperti Atmaja & Komang (2017) yang membuktikan kompetensi aparatur

berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fikri, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang dapat menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadi kecurangan.

2. Berdasarkan hasil hipotesis kedua Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.017 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,923, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 yang berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Keberhasilan pengendalian internal tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian internal tersebut berfungsi. Rahmawati (2012) mengungkapkan bahwa pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Selain kesempatan untuk berbuat curang salah satu unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang efektif harus ada pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang dimiliki oleh suatu instansi untuk memenuhi tujuan dari instansi tersebut.

Kebutuhan ini kadang disalah artikan oleh beberapa oknum sebagai kepentingan pribadi atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu timbulah kerjasama antar beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan dalam memperlancar dan mempermudah kepentingan pribadinya. Jadi, sebaik apapun suatu sistem pengendalian internal yang berada di suatu pemerintahan , apabila pejabat menyalahgunakan wewenangnya maka suatu kolusi akan terjadi. Sehingga suatu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam melakukan pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Usman *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Josephn *et al.*, (2015) yang menyatakan terdapat hubungan signifikan dan positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

3. Berdasarkan hasil hipotesis ketiga. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien parameter 0.204 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,057, sehingga dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 dapat disimpulkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Dengan masih adanya perekrutan aparatur desa yang melalui sistem kekerabatan dan sistem pengendalian internal yang lemah juga mengakibatkan rendahnya sikap integritas aparatur desa, maka dari itu

aparatur cenderung tidak berperilaku jujur dan bertanggungjawab terhadap prinsip ideologi yang etis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011) yang menyatakan, integritas tidak berpengaruh signifikan. Jika integritasnya rendah maka akan mempengaruhi kualitas kerja sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Ramadhaniyati (2014) yang menyimpulkan bahwa integritas berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan.

4. Hasil penelitian menunjukan nilai koefisien parameter sebesar -0.245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020 sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa belum mempunyai akuntabilitas tinggi terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga kemungkinan akan terjadi potensi kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, dalam hal ini perangkat desa harus terbuka dan reponsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan sehingga besar harapan perangkat desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel dan tranparatif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa. Makin rendahnya akuntabilitas maka akan terjadi potensi kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sulthony (2016) dan Santoso (2008) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan data melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X_1) memiliki koefisien parameter sebesar 0.212 dengan tingkat signifikansi 0.130, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 berarti kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Semakin rendah kompetensi aparatur desa maka semakin tinggi potensi terjadinya kecurangan.
2. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) memiliki koefisien parameter sebesar 0.017 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.923, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Semakin

rendah sistem pengendalian internal di suatu instansi semakin tinggi potensi untuk terjadinya kecurangan.

3. Variabel Integritas memiliki koefisien parameter sebesar 0.204 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,057, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 berarti integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Semakin rendah integritas aparat desa maka semakin tinggi potensi terjadinya kecurangan.
4. Variabel Akuntabilitas memiliki koefisien parameter sebesar -0,245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 berarti akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Rendahnya sikap akuntabel aparatur dalam pengelolaan keuangan desa dapat berpotensi terjadinya kecurangan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yakni:

1. Bagi pemerintah, sebaiknya meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur desa sehingga dapat meningkatkan kompetensi aparatur tersebut.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya untuk lebih ikut berpartisipasi dalam penyusunan arah kebijakan APBDes dan turut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, seperti pelatihan , perekrutan yang profesional dan tingkat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assriyani. (2019). "Integritas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa". *Skripsi*
- Atmaja, Saputra. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1, Januari 2017.*
- Cressy, D.R . (1953). "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No 99". *Journal of Corporate Governance and Firm Performance, (13), 53–81.*
- Dewi dkk. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, Dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. *E-journal S1.Ak Universitas pendidikan ganesha jurusan Akuntansi program S1 (Vol: 2 Tahun 2017).*
- Dewi, Damayanti. (2019). Pemoderasi Pengaruh Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan *Fraud*. *E-Jurnal Akuntansi Udayana, Vol.26.3.*
- Fikri, Martiningsih. (2016). Pengeruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompensasi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Akutabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 9, No 1, April 2016.*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Huslina dkk. (2015). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, Dan Pemanfaatan Teknologi Infomasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.*

- Joseph, O. N. O. A. dan J. B. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47–57.
- Laksmi, Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SD, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.26.3.
- Lestari, Supadmi (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetris Informasi Pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.21.1
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, Emba. *Jurnal Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado*, 4(1), 484–495.
- Melisa dkk. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.1, No 3, Seri E, Agustus 2019, Hal 1443-1457*.
- Pratama, Andika. (2017).”Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.” *Skripsi*.
- Ramadhaniyati, Hayati. (2014). Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas Dan Independensi Satuan Pengawasan Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. *JAFFA,02 (10): 101-104*.
- Saputra dkk. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencegah *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi; Vol 10, No. 2*.
- Sari dkk. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi , Vol.1,No 3, Seri E, Agustus 2019; Hal 1443-1457*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthony, M Zahrul. 2016. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengalaman Terhadap Audit dan Mencegah Fraud. Diakses pada tanggal 15 September 2017, <http://akuntansi publikums.blogspot.com/2016/01/pengaruhakuntabilitas-danpengalaman.html>